

INOVASI PEMERINTAHAN DESA SUNGAI KALI MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Farid Nofiard

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

E-Mail : farid.nofiard@ulm.ac.id

ABSTRAK

Masalah laten seputar Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Teknologi Informasi menjadi penghambat utama pemanfaatan Tehnologi Informasi dalam proses inovasi pemerintahan Desa Sungai Kali. Pradigma "asal kawa makan sahari, esok bacari pulang" yang terbentuk di dalam warga Desa Sungai kali turut menjadi kendala pemerintahan Desa Sungai Kali untuk mengembangkan pemerintahan Desanya. Namun pemerintahan Desa Sungai kali telah melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui website desa. Meskipun masih berada pada fase informasi inovasi ini masih sangat mungkin untuk dikembangkan ke fase interaksi bahkan menuju fase transformasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan proses inovasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Sungai Kali dengan berangkat dari teori Solusi E Government milik Backus.

Kata Kunci: *Desa, Pemerintahan, Inovasi, Teknologi Informasi*

ABSTRACT

Latent problems surrounding Human Resources and Information Technology Infrastructure are the main obstacles to the use of Information Technology in the innovation process of the Sungai Kali Village government. The paradigm "asal kawa makan sahari, esok bacari pulang" which was formed among the residents of Sungai Kali Village has also become an obstacle for the Sungai Kali Village government to develop its Village government. However, the Sungai Kali Village government has innovated by utilising information technology through the village website. Although still in the information phase, this innovation is still very likely to be developed to the interaction phase and even to the transformation phase. This research uses descriptive qualitative methods to describe the innovation process carried out by the Sungai Kali Village Government based on Backus's E Government Solution theory.

Keyword : *Village, Government, Inovation, information technology*

PENDAHULUAN

Kemajuan sebuah bangsa akan terwujud jika bagian terkecil dari bangsa itu memiliki motivasi untuk terus bergerak maju, ketergantungan sebuah bangsa terhadap penduduknya ini merupakan sebuah perwujudan negara melalui sebuah pemerintahan sebagai otoritas yang mengatur kehidupan masyarakat bagian dari negara tersebut (Nofiard, 2024). Masyarakat desa sebagai komponen dasar dari masyarakat Indonesia dan merupakan komponen terpenting dari kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri mestilah memiliki sebuah pergerakan kearah kemajuan baik di bidang sosial, budaya, pendidikan maupun teknologi. Kemajuan masyarakat desa akan memberikan *impact* yang sangat signifikan terhadap kemajuan bangsa Indonesia.

Indikasi dari sebuah kemajuan teknologi di era informasi saat ini adalah penggunaan internet. Internet yang menawarkan kecepatan dan kemudahan menjadi tolak ukur kemajuan teknologi. Tidak berbeda didalam bidang pemerintahan penggunaan teknologi juga digalakan dengan langkah -langkah digitalisasi dan pertukaran informasi yang cepat sehingga menunjang kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya.

Dikehendaki ataupun tidak pada faktanya kesenjangan kemajuan antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan di Indonesia memiliki

kesenjangan yang cukup mencolok di berbagai bidang, terlebih lagi pada bidang teknologi kesenjangan yang terjadi antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan dapat dilihat perbedaannya tanpa harus melakukan pengamatan mendalam. Media televisi dan radio memang tidak lagi menjadi permasalahan untuk di akses oleh masyarakat desa, namun belakangan *trend* kemajuan penyebaran informasi tidak lagi bertumpu kepada 2 media tersebut. Kecenderungan masyarakat untuk mengakses informasi lebih kepada informasi internet yang dapat diakses di dalam genggam kapan pun dan dimanapun. Selain dari sisi kepraktisan ternyata dari sisi kecepatan pun media internet jauh mengungguli dari media televisi ataupun media radio. Gambaran kondisi perbandingan akses internet antara masyarakat pedesaan dan perkotaan tertuang dari hasil survei APJII pada tahun 2022-2023, data yang tersaji dalam survei tersebut menunjukkan dominasi penggunaan internet masyarakat perkotaan sebesar 64,57 % dibandingkan dengan tingkat penggunaan internet masyarakat pedesaan (APJII, 2023).

Masyarakat di generasi revolusi industri 4.0 dituntut untuk beradaptasi dengan kehidupan digital dengan mengubah moda komunikasinya (Nofiard, 2022). namun proses adaptasi itu bukan proses tanpa hambatan bagi masyarakat desa, infrastruktur disinyalir menjadi penyebab utama dari permasalahan kesenjangan antar

masyarakat desa dan masyarakat perkotaan ini. Keterbatasan akses terhadap internet menjadi penghalang kemajuan masyarakat desa karena informasi yang lebih lambat didapatkan. Pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan terus membangun ekosistem internet di Indonesia hingga ke pelosok desa, melalui Kemkominfo pemerintah Indonesia telah meluncurkan proyek palapa ring dengan membangun sepanjang 12.148 kilometer serat optik yang membentang dari sabang hingga Papua (Administrator, 2023). Namun faktanya penggunaan internet pada masyarakat pedesaan belum menunjukkan peningkatan yang cukup mencolok.

Penggunaan internet yang telah digambarkan ini juga merupakan gambaran dari bagaimana pemerintahan desa memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang diisi oleh masyarakat desa itu sendiri lebih cenderung menjalankan pemerintahannya secara manual, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Anggraeni & Purnamasari, 2022). Namun sinergisitas harus terbangun antara pemerintahan desa dan masyarakatnya, sebaik apa pun pemerintah desa membuat program inovasi desanya keberhasilan program sulit untuk dicapai jika masyarakat desa sebagai *in user* dari program tersebut

tidak ada pergerakan inovatif untuk mencapai kemajuan pemerintahan desa.

Pembentukan website desa seluruh desa di Kecamatan Barambai baru terbentuk pada bulan Mei 2023 atas kerjasama Pemerintah Kecamatan Barambai dan Universitas Lambung mangkurat, sehingga pemanfaatan teknologi Informasi dalam pemerintahan tergolong baru termasuk pemerintahan desa Sungai Kali. Permasalahan klasik masyarakat desa mengenai kualitas SDM dan pengetahuan memberikan dampak yang tidak kalah signifikan dibandingkan infrastruktur yang diperlukan. Pemerintahan desa yang dijalankan sebagai rutinitas dan formalitas sebagai sebuah desa yang memiliki sebuah organisasi pemerintahan. Pelayanan yang diberikan sangat minim penyentuh kearah inovasi desa sehingga sangat sulit mencari perbedaan perkembangan pemerintahan desa dari satu periode pemerintahan kepala desa kepada kepala desa selanjutnya. Pemerintahan desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan kecamatan bahkan pemerintah pusat terkesan hanya menjalankan program-program yang sudah di buat tanpa ada program tambahan yang lebih khas dan mengena terhadap masyarakat desanya.

Keterbatasan Infrastruktur dan kualitas SDM masyarakat juga merupakan masalah utama dari perkembangan pemerintahan desa Sungai Kali. Namun demikian pemerintah desa Sungai Kali

Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala telah berupaya melakukan inovasi terhadap pemerintahan desanya, bekerja sama dengan universitas Lambung Mangkurat pemerintah desa telah mulai membangun dan mengembangkan website desa sebagai sarana informasi dari desa Sungai Kali. Namun sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi sebagai bentuk inovasi yang dilakukan pemerintahan desa Sungai kali akan coba penulis telaah dan sajikan melalui artikel ini, sehingga dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan pemerintah desa sungai kali untuk kemajuan kualitas pemerintahan desanya.

METODE

Untuk menjawab permasalahan yang timbul dari pemerintahan desa Sungai Kali, metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dirasa cukup tepat dipergunakan dalam penelitian ini. Analisa terhadap fenomena yang muncul di tengah pemerintahan desa Sungai kali dipergunakan sebagai dasar pemberian solusi pemecahan masalah yang timbul.

Tiga langkah analisa data berupa reduksi data, data *display* serta verifikasi dan penarikan kesimpulan dipergunakan dalam penelitian ini. Titik berat analisa berada pada verifikasi dan penarikan kesimpulan sebagai langkah agar dapat menjelaskan dari tiga langkah analisa yang telah disajikan (Sugiono, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung kepada pemerintahan desa Sungai kali dan masyarakat desa Sungai Kali. Untuk mendapatkan data peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap masyarakat dan perangkat desa sungai kali guna mendapatkan data yang berhubungan dengan inovasi pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi Informasi.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa

Ketika dihadapkan kepada kata pemerintah dan kata pemerintahan kita akan dihadapkan kepada dua hal yang berbeda. Kedua kata ini berasal dari dasar kata yang sama yaitu perintah. Kata pemerintah dipahami sebagai organ negara yang menjalankan fungsi dari pemerintahan. Pemerintah merujuk kepada alat- alat negara yang bekerja untuk menjalankan wewenangnya sebagai alat negara yang secara sah memiliki wewenang untuk menjalankan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan atau tanggung jawab atas jalannya fungsi kenegaraan. Pemerintah merupakan sebuah kata yang subjektif menuju kepada individu yang memiliki kekuasaan memerintah baik dalam artian sempit yaitu eksekutif maupun dalam artian luas yaitu eksekutif dan legislatif. Dengan kata lain untuk menjamin kesejahteraan

warganya dan memastikan tanggung jawab serta fungsi negara itu berjalan dengan baik akan ada individu atau sekelompok individu yang secara sah diberikan tanggung jawab untuk menjalankannya. Individu individu inilah yang dikenal umum sebagai pemerintah.

Berbeda dengan kata pemerintah, kata pemerintahan merujuk kepada fungsi penyelenggaraan negara. Negara harus menjamin kesejahteraan warganya, menjamin akses pendidikan dan kesehatan yang layak dan merata kepada warganya, negara harus memberikan jaminan sosial bagi setiap warganya. Fungsi-fungsi penyelenggaraan untuk memenuhi kewajiban negara ini lah yang dikenal dengan pemerintahan (Sugiman, 2018). Sebagai contoh setiap warga miskin dan anak-anak terlantar dijamin dan dipelihara oleh negara, maka melalui dinas sosial pemerintah meluncurkan program pembagian beras dan telur untuk warga miskin. Individu yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan program ini disebut dengan pemerintah, dalam hal ini dinas sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial. Sedangkan pemerintahannya adalah penyelenggaraan program pembagian beras dan telur bagi warga miskin dalam rangka menjalankan fungsi negara untuk

menjamin dan memelihara warga fakir miskin dan anak terlantar.

Dalam konteks pemerintah desa dan pemerintahan desa, termuat di dalam Undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dapat dipahami semua kegiatan penyelenggaraan segala urusan pemerintahan didesa baik menyangkut permasalahan administratif seperti contohnya pengaturan jam kegiatan- kegiatan kemasyarakatan di desa, atau memberikan rekomendasi atau surat keterangan dari desa kepada warga desanya ataupun penyelenggaraan kegiatan dalam rangka menjamin kesehatan warga desa seperti posyandu atau posyandu lansia. Kegiatan penyelenggaraan ini disebut dengan pemerintahan desa. Sedangkan individu yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam hal ini Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desanya disebut dengan Pemerintah desa.

Kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan

desanya. Pemerintahan desa harus menjamin kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran warga desanya. Pemerintah desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik untuk mewujudkan desa yang demokratis, kuat, maju dan mandiri.

Pemerintahan desa adalah merupakan bagian dari satuan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan desa memiliki hak untuk melakukan pengaturan terhadap warga desa, pemerintahan desa juga memiliki hak untuk mengurus kepentingan setiap warga yang berada di dalam desa. Berbeda dengan kelurahan, lurah sebagai pemimpin tertinggi di sebuah kelurahan merupakan bawahan dari camat. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kerja kecamatan sehingga lurah hanya melaksanakan fungsi administratif sebagai perpanjangan tangan dari Camat. Lurah tidak memiliki hak seperti kepala desa yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan warganya. Sehingga seorang Kepala Desa dipilih oleh warga desanya sedangkan seorang lurah merupakan seorang yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi kelurahan.

2. Inovasi Pemerintahan Desa

Secara bahasa inovasi berasal dari serapan bahasa belanda yaitu *innovatie*, inovasi dapat dipahami sebagai sebuah proses pengembangan pengetahuan,

keterampilan dan pengalaman untuk menghasilkan produk baru ataupun melakukan perbaikan terhadap produk yang telah ada yang bertujuan untuk mendapatkan *value* yang signifikan terhadap produk tersebut (Wikipedia, 2023).

Seorang individu, badan ataupun organisasi dikatakan telah melakukan inovasi jika mereka melakukan sebuah proses perbaikan agar dapat memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum melakukan inovasi. Sebuah perusahaan jasa *laundry* misalnya dihadapkan oleh permasalahan penjualan produknya yang tidak kunjung naik karena pelanggan kesulitan menuju lokasi usaha atau sebab kecenderungan pengguna jasanya adalah orang yang sangat sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk mengantarkan pakaian kotornya. Perusahaan *laundry* ini melakukan upaya perubahan terhadap usahanya dengan menyediakan jasa layanan jemput dan antar. Ternyata dengan jasa layanan jemput dan antar dapat meningkatkan penjualan produk jasanya.

Perusahaan *laundry* ini telah menghasilkan nilai atau *value* yang lebih dibandingkan dengan kondisi saat perusahaan *laundry* ini. Ada proses dan usaha menciptakan atau memperbaiki produknya sehingga nilai atau *value* yang mengarah kepada yang lebih baik dapat

dicapai. Perusahaan *laundry* ini dapat dikatakan sedang berinovasi atau sedang melakukan proses inovasi.

Mengutip pendapat dari suryani, inovasi juga mencakup hingga kepada pembuatan ide baru ataupun perbaikan terhadap ide yang sudah ada tidak hanya terbatas kepada pembuatan atau perbaikan produk (Lamboaso et al., 2020). Walaupun dapat diartikan secara luas ide juga merupakan sebuah produk, produk adalah hasil dari sebuah proses baik itu berupa fisik ataupun non fisik. Katakanlah dua kelompok yang sedang berseteru dan tidak ada menemukan titik terang walaupun upaya perdamaian ditempuh dengan mempertemukan wali atau orang yang dipandang oleh kelompok yang berseteru, kemudian datanglah seorang penengah yang memberikan ide untuk mempertemukan kedua belah yang berseteru dan membuat pernyataan tertulis agar seluruh pihak berdamai. Ide untuk mempertemukan kedua belah pihak adalah sebuah hasil dan juga proses dalam upaya mencapai tujuannya yaitu perdamaian.

inovasi berawal dari permasalahan yang ingin diselesaikan kemudian ada kegiatan atau proses baik penciptaan produk atau langkah perbaikan produk untuk mendapatkan nilai lebih dibanding kondisi awal sehingga

tujuan awal atau permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan.

Kata kunci dari inovasi adalah berproses sehingga inovasi tidak dapat dicapai secara instan keberhasilannya. Ada tahapan-tahapan yang harus dijalani agar inovasi itu memberikan *outcome* yang diperlukan dan memberikan *impact* yang signifikan terhadap pelaku inovasi. Dalam teori difusi inovasi setidaknya inovasi harus melewati 5 tahapan dalam mengambil keputusan terhadap inovasi yaitu *Knowledge* (Pengetahuan) adalah tahap awal pemberian informasi mengenai inovasi, *Persuasion* (kepercayaan) merupakan tahapan pertimbangan untung dan ruginya inovasi, *Decission* (keputusan) sebuah tahapan pengambilan keputusan inovasi itu dijalankan atau tidak, *Implementation* (penerapan) pada tahapan ini inovasi telah dikonfirmasi dapat dijalankan dan telah terukur untung dan ruginya, dan terakhir *confirmation* (konfirmasi) merupakan tahapan evaluasi terhadap inovasi tersebut dan memberikan gambaran inovasi dapat dilanjutkan atau dihentikan (Mailin et al., 2022).

Negara dalam hal ini pemerintahan memiliki fungsi untuk menjamin kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran warga negaranya. Pemerintah sebagai alat atau organ yang menyelenggarakan

pemerintahan mestinya selalu melakukan upaya ataupun langkah-langkah perbaikan untuk mencapai tujuan terpenuhinya fungsi pemerintahan tersebut. Pemerintah akan terus berproses menciptakan ide-ide baru atau memperbaiki ide-ide yang telah ada sehingga peningkatan kualitas pemerintahan akan terus meningkat. Produk-produk pemerintahan akan terus dikembangkan untuk menghasilkan nilai atau *value* sehingga kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran warga dapat diwujudkan. Proses perbaikan dari kualitas produk pemerintahan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik inilah yang diartikan sebagai Inovasi pemerintahan.

Dalam konteks Pemerintahan desa, Kepala Desa yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya harus menggunakan prinsip dasar mengayomi warganya. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa juga harus selalu melakukan langkah-langkah perbaikan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan warganya. Kepentingan dan kebutuhan warga tentu saja akan selalu dinamis dan berubah-ubah baik karena pengaruh tuntutan eksternal maupun internal. Sehingga pemerintahan desa harus terus berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Dengan berinovasinya pemerintahan desa dapat menciptakan nilai atau *value* untuk dapat mengakomodir setiap kepentingan dan kebutuhan warganya dan pada akhirnya inovasi pemerintahan desa dapat memberikan dampak yang baik dan signifikan terhadap kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan warganya.

Pemerintah adalah *inovator*, *motivator* sekaligus *problem solver*. Ini adalah entitas kuat yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pembangunan warganya. Pemerintah memainkan peran penting dalam menjaga hukum dan ketertiban, menyediakan fasilitas dasar, dan memastikan pertumbuhan dan kemajuan negara secara keseluruhan. Inovasi adalah salah satu kekuatan utama pemerintah. Pemerintah di seluruh dunia banyak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, yang mengarah pada penciptaan teknologi dan inovasi baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan peraturan yang mendorong inovasi dan mendorong terciptanya bisnis dan industri baru. Motivasi adalah peran penting lainnya dari pemerintah. Pemerintah mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dapat bermanfaat bagi

masyarakat, baik itu kegiatan sukarela, keterlibatan masyarakat, atau kewirausahaan. Pemerintah juga memberikan insentif seperti pajak

3. Teknologi Informasi Pemerintahan

Geliat penerapan teknologi informasi mulai terpantik seiring diterbitkannya Inpres nomer 3 tahun 2003. Kampanye *paperlees* mulai digaungkan pada saat itu, pemerintah sudah mulai mentransformasi layanannya ke arah digital (Witri, 2022). Pemerintah tidak lagi memberikan layanan secara tradisional dengan menggunakan kertas sebagai mediana akan tetapi pemerintah telah mulai mengadopsi teknologi informasi dalam setiap aspek layanannya.

Pergeseran paradigma pemerintahan ke arah sebuah pemerintahan yang berbasis layanan mengharuskan pemerintahan menyajikan layanan prima terhadap *stakeholder* utamanya yaitu warganegara. Layanan prima ini dapat berupa akses informasi yang cepat, transparan, aktual dan terpercaya maupun pemberian solusi yang tepat dan efisien atas setiap keluhan dari kepentingan warga negara. Akan tetapi sebelum dapat memberikan layanan prima terhadap *stakeholder* sudah menjadi keharusan pula pemerintahan itu berada dalam kondisi prima.

Pemerintah yang notabene merupakan pelayan masyarakat tidak akan pernah terlepas dari paradigma pelayanan publik yang belakangan ini sudah mulai mengalami pergeseran paradigma. semula jalannya pemerintahan menerapkan prinsip menjalankan pemerintahan dengan membubuhi unsur bisnis kedalamnya, warga negara sebagai *user* dari program yang dijalankan pemerintah diposisikan sebagai pelanggan. Prinsip seperti ini yang merupakan kiblat utama pemerintahan saat ini dikenal dengan paradigma *New Public Management* perlahan tapi pasti mulai tergerus ke arah *New Public Service* (Alamsyah, 2016). Prinsip dasar yang sangat mencolok pada konsep *New Public Service* adalah pada peran pemerintahan yang lebih kepada pelayan masyarakat. Peran pemerintah tidak lagi sebagai pengarah pada paradigma *New Public Management* akan tetapi peran pemerintah yang ditawarkan oleh paradigma *New Public Service* adalah memberikan layanan. Ilmuan dan Peneliti dibidang Pemerintahan mengenal fenomena ini dengan pergeseran dari *Government* ke arah *Governance*.

Pergeseran paradigma ini telah menghadirkan perspektif yang baru ditubuh pemerintahan terhadap Inovasi. Inovasi dipandang penting dalam kondisi paradigma *New*

Publik Management karena bagaimanapun juga pemerintah dalam memberikan arahan terhadap warga negara mestilah memiliki terobosan-terobosan baru. Peningkatan perhatian terhadap inovasi terjadi pada paradigma *New Public Service*, paradigma ini menganggap inovasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Dasar pelayanan yang disajikan paradigma ini mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan prima kepada warga sehingga pembaharuan layanan dan perbaikan layanan sangat dibutuhkan dalam memenuhi kepentingan warga (Sururi, 2017).

Kembali lagi ini merupakan sebuah hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, hubungan ini merupakan hubungan dua arah yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kesejahteraan warga negara dihasilkan dari layanan prima yang di berikan oleh pemerintahnya dan disisi sebaliknya layanan prima juga dapat terwujud dengan dukungan dari warga negara itu sendiri selain kondisi internal dari pemerintahan itu sendiri. Sinergisitas antara kedua belah pihak ini harus terjalin dengan baik, pemerintah memberikan layanan terbaik dalam rangka menjalankan fungsinya untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran warga disisi lain warga memanfaatkan dan memberikan *feedback* yang positif terhadap

program-program yang dijalankan oleh pemerintah itu.

Demikian pula halnya dalam pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan, pemerintah sebagai penyaji layanan kepada warga negara mestilah menyediakan layanan yang berbasis teknologi yang tepat guna bagi warga negara. Program yang diluncurkan harus benar-benar mengakomodir kebutuhan dari warga negara sehingga warga akan benar-benar memanfaatkan program yang telah diluncurkan. Pemerintah harus mengetahui tingkat prioritas yang dibutuhkan warga sehingga pemanfaatan teknologi ini menjadi efisien dan tidak sia-sia. Warga sebagai *in user* dari program yang dicanangkan oleh pemerintah juga harus mendukung dengan memanfaatkan program yang diluncurkan. Sehingga kualitas pemerintah dan warga atas harus selalu ditingkatkan dan mendukung satu sama lain agar tidak terjadi ketimpangan. Program berbasis teknologi informasi yang sangat baik tidak akan dapat berjalan jika warganya gagap terhadap teknologi informasi, sebaliknya warga yang telah mumpuni dibidang teknologi informasi tidak dapat berkembang jika pemerintahnya gagap terhadap teknologi informasi. Ini menunjukkan hubungan yang saling menguatkan sekaligus melemahkan dalam pemanfaatan teknologi

informasi dilingkungan pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam hubungan antara pemerintah dan warga mengalami 3 fase yaitu fase informasi, fase interaksi dan fase transformasi sesuai dari teori yang telah dikemukakan oleh Backus tentang solusi *e-government* (Praditya, 2014). Setiap fase yang dilalui merupakan peningkatan sinergisitas antara pemerintah dan warganya dibidang pemanfaatan teknologi informasi. Pada fase informasi merupakan tahapan awal dari pemanfaatan teknologi informasi, pada fase ini masih berupa hubungan satu arah dari pemerintah. Pemerintah memberikan informasi mengenai kondisi internalnya, pemerintah menyediakan layanan informasi mengenai organisasinya atau identitasnya berupa alamat dan kontak person yang dapat dihubungi warga untuk mengakses layanan. fase ini juga merupakan fase promosi dari pemerintah agar warga mengetahui pemerintahannya telah memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada warganya. Pengembangan pada fase ini pemerintah akan memberikan informasi mengenai peraturan atau undang-undang, berita yang berkenaan dengan pemerintahan maupun program-program yang dijalankan oleh pemerintahan untuk memberikan layanan kepada

warganya. Warga bertugas mengakses informasi dan memperdalam informasi yang diberikan pemerintah tersebut.

Tahap selanjutnya adalah fase interaksi, pada tahap ini komunikasi sudah dalam bentuk dua arah. Pemerintah sebagai penyedia layanan akan menyediakan konten untuk di unduh, menampilkan form atau survei untuk diisi. *Feedback* yang diberikan warga juga lebih aktif. Warga akan mengisi form atau survei yang disediakan. Interaksi lebih intens antara pemerintahan dan warga. Namun warga hanya berstatus sebagai pengunjung yang dapat mengakses informasi dan menjalin komunikasi dengan pemerintahan secara umum. Personalisasi warga akan terjadi saat memasuki fase selanjutnya yaitu fase transformasi, pada tahap ini warga akan membuat akun untuk mendapatkan akses yang disediakan oleh pemerintah secara menyeluruh. Warga akan terintegrasi dengan pemerintah dan dapat menikmati seluruh layanan yang diberikan oleh pemerintah. *Feedback* yang diberikan warga pada tahapan ini dapat menjadi evaluasi terhadap program yang diluncurkan oleh pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa sungai kali merupakan sebuah desa yang berada di kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala

Provinsi Kalimantan selatan. Secara geografis wilayah desa sungai Kali didominasi oleh daerah rawa dan merupakan desa di pesisir sungai Barito, kehidupan warganya digantungkan dengan hasil alam sehingga mayoritas warga desanya bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Desa sungai kali memiliki kekhasan yang jika dikembangkan dapat menjadi produk khas desanya yaitu anyaman purun. Sebagai daerah rawa wilayah desa sungai kali banyak ditumbuhi sejenis tanaman purun tikus atau tanaman dengan nama latin *Eliocharis Dulcis* yang dimanfaatkan oleh warga desa sungai kali sebagai kerajinan tangan anyaman purun. Namun saat ini produksi anyaman purun hanya berupa olahan alat untuk penunjang kehidupan seperti topi yang dipergunakan sebagai penghalau panas saat bertani atau anyaman tikar purun yang dipergunakan sebagai karpet rumah. Peningkatan nilai produk anyaman purun untuk dijadikan produk Fashion atau produk wisata sudah mulai dicoba lakukan namun keterbatasan pengetahuan dan anggapan bahwa anyaman ini bukan merupakan usaha utama yang bisa menopang penghasilan menjadi kendala utama perkembangan produk anyaman ini (Vikalista et al., 2022).

Perkembangan pemerintahan Desa Sungai Kali sudah mengalami perkembangan namun tidak bergerak secara signifikan, perkembangan

pemerintahan desa sungai kali ini dipicu oleh tuntutan dari warga desanya. Seperti karakteristik masyarakat desa di Kalimantan Pada umumnya, masyarakat Desa Sungai Kali tidak terlalu begitu konsentrasi terhadap kemajuan teknologi. Faktor alam yang subur dan kebutuhan hidup yang dapat dipenuhi oleh alam menjadi faktor utamanya. Paradigma yang berkembang di kalangan masyarakat desa dengan ungkapan "*asal kawa makan sahari, esok bacari pulang*" turut menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan kehidupan masyarakat desa Sungai kali. Konsep paradigma ini adalah selama masih bisa tercukupi kebutuhan hidup dalam sehari maka kehidupan sudah cukup baik untuk dijalankan. Paradigma ini juga menjadi sebuah tembok besar penghalang kemajuan kehidupan masyarakat Desa Sungai kali, karena menjadikan masyarakat Desa Sungai kali enggan melakukan pergerakan-pergerakan lebih untuk memperbaiki kehidupannya.

Hal ini juga memberikan dampak pada pemerintahan Desa Sungai Kali. Tuntutan dari warga sebenarnya merupakan faktor pendorong yang sangat efektif untuk kemajuan Pemerintahan Desa itu sendiri. Warga yang menuntut banyak kepada pemerintahnya menjadikan pemerintah terus bergerak menemukan solusi atas masalah kepentingan warganya, kemudian sebaliknya jika warganya pasif maka pemerintahan akan dijalankan sejalannya saja. Ini

menggambarkan hubungan antara pemerintahan desa dan warganya, namun inisiasi perkembangan ini juga dapat dipicu melalui inovasi dari pemerintah desa itu. Dengan Inovasi dari pemerintahan desa memberikan pengetahuan baru kepada warga desa bahwa ada cara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik sehingga menimbulkan gairah untuk bergerak. Pada akhirnya jika cara ini berhasil memicu warga maka akan menciptakan tuntutan warga kepada pemerintahan Desa dan pemerintah desa akan bergerak untuk memenuhi kebutuhan warga desanya.

Pemerintah Desa Sungai Kali sudah mulai mengupayakan itu dengan cara melakukan inovasi terhadap pemerintahan Desa Sungai Kali. Pemerintah Desa Sungai Kali sudah mulai mencoba memanfaatkan teknologi Informasi dalam Pemerintahan Desanya, langkah yang dilakukan yaitu dengan membangun website Desa Sungai Kali. Dengan website ini pemerintahan desa sungai kali mencoba memperkenalkan Desa Sungai Kali kepada dunia luar dan memperkenalkan dunia luar kepada warga Des Sungai Kali. Dalam menelaah pemanfaatan Tekhnologi Informasi pada pemerintahan desa Sungai Kali ditinjau melalui teori dari Backus tentang tahapan dari solusi *E Government*.

Pada website Desa Sungai Kali ini di sediakan wadah untuk pengrajin anyaman purun agar dapat menjual

produk anyaman purun secara online. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memberikan alternatif lain agar produk anyaman purun dari warga desa Sungai kali dapat memasarkan produknya. Selain daripada itu sebagai langkah antisipatif untuk memutus mata rantai tengkulak, diketahui bahwa pengrajin tidak dapat menjual hasil produk anyamannya selain kepada tengkulak. Karena keterbatasan waktu dan pengetahuan para pengrajin tidak dapat menjual produknya keluar desa Sungai Kali. Sedangkan Produk ini tidak laku di Desa Sungai Kali karena rata-rata warganya bisa membuat produk purun dari hasil alam yang didapat secara gratis dari alam. Sehingga di Desa Sungai Kali tidak ada permintaan pembeli produk Anyaman Purun, akhirnya mau tidak mau pengrajin harus menjual kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah.

Dengan disediakannya sarana pemasaran online ini memberikan nilai pengetahuan baru kepada warga desa bahwa ada cara lain untuk memasarkan produknya dan memperoleh harga yang lebih tinggi. Dari langkah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sungai Kali dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sungai kali telah melakukan inovasi terhadap pemerintahan desanya karena ada proses atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa Sungai Kali untuk menciptakan produk baru atau memperbaiki produk pemerintahannya sehingga memberikan nilai terhadap

layanannya yaitu nilai pengetahuan yang diperoleh oleh warga Desa Sungai Kali atau dalam hal ini pengrajin Anyaman Purun. Inovasi ini dapat terus dikembangkan karena solusi atas masalah-masalah lain dari warga desa sungai kali dapat diperoleh atau diinisiasi dari inovasi ini.

Pemanfaatan teknologi informasi jelas terlihat dilakukan oleh pemerintahan desa Sungai Kali dengan menggunakan sarana internet dalam melakukan inovasinya. Walaupun dalam tahapan pemanfaatan teknologi informasi Desa Sungai Kali masih berada pada tahapan awal pemanfaatan teknologi informasi yaitu fase informasi. Hubungan antara pemerintahan Desa Sungai Kali dan warga Desa Sungai Kali masih berupa hubungan satu arah. Melalui website Desa Sungai Kali Pemerintahan Desa Sungai Kali memberikan informasi bahwa pemerintahan Desa Sungai Kali melakukan langkah inovasi untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh warga Desa Sungai kali dengan memanfaatkan teknologi informasi. Warga desa masih pasif dan untuk mencari informasi lebih tentang inovasi yang dilakukan pemerintahan Desa Sungai Kali karena ketakutan dan antipati warga terhadap teknologi. Mereka belum menyadari bahwa teknologi dapat dijangkau oleh siapa pun.

Untuk mengatasi masalah pemerintah Desa Sungai Kali telah melakukan langkah lain yaitu dengan

mensosialisasikan kepada warga Desa tentang pemasaran online ayaman purun dengan menggandeng pihak Universitas Lambung Mangkurat. Upaya ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru lagi kepada warga Desa Sungai Kali sehingga menghilangkan rasa enggan dan ketakutan warga Desa Sungai Kali dalam memanfaatkan teknologi informasi. Harapannya inovasi yang dilakukan Pemerintah Desa Sungai Kali dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat meningkat ke tahap selanjutnya yaitu fase interaksi dimana warga Desa Sungai kali dapat memberikan *feedback* yang positif terhadap inovasi yang dilakukan sehingga tercipta hubungan dua arah antara pemerintah Desa Sungai Kali dengan warga Desa Sungai Kali.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Sungai kali telah melakukan inovasi terhadap Pemerintahan desa Sungai kali dengan memanfaatkan teknologi informasi. Inovasi ini dapat dilihat dari pembangunan website Desa Sungai kali dan memberikan sarana alternatif penjualan produk Anyaman Purun. Proses ini menciptakan produk baru dan memberikan nilai pengetahuan baru terhadap warga Desa Sungai Kali. Meskipun pemanfaatan teknologi informasi ini masih berada pada fase informasi yaitu tahapan awal dari tiga tahapan solusi *E Government* yang dikemukakan oleh Backus namun masih

mungkin dapat dikembangkan ke fase interkasi bahkan menuju fase transformasi.

Kendala yang dihadapi pemerintahan Desa Sungai kali adalah paradigma "asal kawa makan sahari,

esok bacari pulang" yang tumbuh di masyarakat Desa Sungai Kali sehingga warga enggan untuk berkembang dan ketakutan dan rasa antipati warga Desa terhadap perkembangan teknologi informasi

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2023, May 26). *Memenuhi Layanan Digital hingga Pelosok*. Indonesia.Go.Id. <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/7162/memenuhi-layanan-digital-hingga-pelosok?lang=1%20>
- Alamsyah, A. (2016). PERKEMBANGAN PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/profetik.v4i2a4>
- Anggraeni, N., & Purnamasari, H. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Studi Kasus Pada Aplikasi Sapa Cetar. *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6).
- APJII. (2023). *Survei Penetrasi dan Perilaku Internet 2023*.
- Lamboaso, D. H., Pangemanan, S., & Monitja, D. (2020). Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Essang Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Mailin, M., Rambe, G., Ar-Ridho, A., & Candra, C. (2022). TEORI MEDIA/TEORI DIFUSI INOVASI. *Jurnal Guru Kita PGSD*, 6(2), 168.
- <https://doi.org/10.24114/jgk.v6i2.31905>
- Nofiard, F. (2022). Komunikasi Politik Digital di Indonesia. *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 10(2), 31. <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i2.7548>
- Nofiard, F. (2024). *Corak Pemerintahan dan Politik Islam* (N. Duniawati, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Adanu Abimata.
- Praditya, D. (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 17(2), 129–140. <https://doi.org/10.20422/jpk.v17i2.12>
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1).
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 14. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16236>
- Vikalista, E., Bhakti Mafriana, S., Pakpahan, M. H., Dewaji, H. A., Nabila, F., Azura, B.,

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 10, Nomor 2, Mei 2024

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 31 Januari 2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

- Norumansyah, M. B., Abidin, A. Z., Nursyifa, D., Ameliasari, H. D., Maulida, P., & Athaya, N. A. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Anyaman Purun Desa Sungai Kali Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan. *Journal of Empowerment and Community Service (JECSR)*, 2(3).
- Wikipedia. (2023). *Inovasi*. Id.Wikipedia.Org. <https://id.wikipedia.org/wiki/Inovasi>
- Witri, M. G. (2022). Digitalisasi Pelayanan: Adopsi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Berbasis Website . *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1811–1826.